GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: Kompas**	**Tanggal**	**: 26 Desember 2006**
Subyek	**: Restorasi dan Motarium**	**Hari**	**: Selasa**
		Halaman	**: 12**

Lingkungan Hidup

Pemerintah Didesak Lakukan Restorasi dan Moratorium

Jakarta, Kompas - Guna mengurangi korban bencana ekologis di berbagai wilayah di Tanah Air pada masa-masa mendatang, pemerintah didesak supaya menerapkan kebijakan restorasi kawasan dan moratorium. Hutan-hutan rusak perlu segera diperbaiki kembali dan penebangan kayu untuk berbagai kebutuhan harus dikendalikan atau dihentikan.

"Bencana ekologis sudah datang silih berganti. Korban terus berjatuhan. Jika negara tidak melakukan restorasi dan moratorium di kawasan-kawasan genting, tahun-tahun mendatang jumlah korban bencana ekologis makin meningkat," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Chalid Muhammad, Senin (25/12).

Bencana ekologis berupa banjir disertai tanah longsor baru-baru ini terjadi di enam wilayah kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam. Bencana itu mengakibatkan puluhan ribu warga mengungsi dan sejumlah korban tewas. Bencana ditimbulkan oleh ketidakmampuan fungsi kawasan hutan pegunungan sebagai area tangkapan hujan.

Chalid menekankan, upaya restorasi kawasan tidak berorientasi pada pengalokasian anggaran, tetapi kinerja lintas sektoral yang terintegrasi. Misalnya, berbagai instansi dalam menata wilayah sungai, kehutanan, dan pertanian perlu kesatuan program.

"Jika upaya restorasi kawasan tidak ditempuh, berarti pemerintah dan negara secara sengaja melanggar hak asasi manusia. Pembiaran terhadap kondisi hutan atau lingkungan rusak yang mengancam keselamatan manusia ini juga sebagai kejahatan," kata Chalid.

Selanjutnya, untuk kebijakan moratorium pada kawasan hutan tersisa, lanjut Chalid, juga harus disertai kebijakan hemat kayu. Orientasi kebutuhan kayu secara nyata harus didefinisikan dan kebutuhan yang mendesak yang didahulukan.

Secara terpisah, Deputi Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup Masnellyarti mengatakan, restorasi dan moratorium saat ini sangat bergantung pada kemampuan dan kondisi pemerintah otonomi daerah masing-masing.

"Pemanfaatan hutan dan kemampuan memperbaiki hutan yang rusak menjadi wewenang setiap pemerintah daerah. Namun, pemerintah pusat memberikan insentif dengan mengalokasikan dana alokasi khusus untuk restorasi hutan atau mempertahankan hutan-hutan lindung yang tersisa," katanya.

Restorasi dan moratorium juga bergantung pada kemampuan warga setempat, termasuk pada potensi pengawasannya. Dalam waktu dekat, kata Masnellyarti, Kementerian Negara Lingkungan Hidup akan menerbitkan pedoman penanaman lahan dan hutan berbasis masyarakat. (NAW)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup